



JURNAL AKUNTANSI

Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni 2018 30-39

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>

ISSN: 1907-9958 (Print)

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 – 2015)

R. Neneng Rina Andriani^{a,*}, Nisa Noor Wahid^b

^a Universitas Siliwangi, Indonesia

^b Universitas Siliwangi, Indonesia

*nenengrina@unsil.ac.id

Diterima: Juni 2018. Disetujui: Juni 2018. Dipublikasikan: Juni 2018

ABSTRACT

The research objective to know (1) Original Local Revenue, Intergovernmental Transfer and Financial Self-Sufficiency of Local Governments at Government of Tasikmalaya City, (2) The Influence of Original Local Revenue with partial to Financial Self-Sufficiency of Local Governments, (3) The Influence of Intergovernmental Transfer with partial to Financial Self-Sufficiency of Local Governments, (4) The Influence of Original Local Revenue and Intergovernmental Transfer with simultaneous to Financial Self-Sufficiency of Local Governments. The method used in this research is descriptive method by using a case study approach. The data analysis technique used multiple regression analysis. The results of data processing indicates that: (1) Original Local

Revenue, Intergovernmental Transfer and Financial Self-Sufficiency of Local Governments at Government of Tasikmalaya City is have fluctuation, (2) Partially the Original Local Revenue have significant influence to ability of Financial Self-Sufficiency of Local Governments (3) Partially the Intergovernmental Transfer have significant influence to ability of Financial Self-Sufficiency of Local Governments (4) Simultantly the Original Local Revenue and Intergovernmental Transfer have significant influence to ability Financial Self-Sufficiency of Local Governments.

Keywords: *Original Local Revenue, Intergovernmental Transfer, Financial Self-Sufficiency of Local Governments*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya, (2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kemandirian Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa sistem pemerintahan Indonesia pada masa orde baru mengacu pada system sentralisasi. Sistem ini merupakan system penyelenggaraan pemerintah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat dengan luasnya wilayah yang tersebar. Pemerintah pusat mendapat kesulitan dalam melaksanakan transparansi secara proporsional terhadap pembangunan nasional. Karena hal ini menumbuhkan tendensi bagi pemerintah pusat untuk lebih memfokuskan dirinya pada pembangunan di pusat dan seolah mengenyampingkan kebutuhan pembangunan yang ada di daerah, khususnya daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat.

Imbasnya terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang cukup signifikan antar daerah. Sehingga hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan adanya ketimpangan pembangunan dan pelayanan yang tidak tertata secara transparan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk merubah kebijakan yang ada, yakni merubah kebijakan sentralisasi menjadi system desentralisasi. Kebijakan desentralisasi ini terbentuk seiring dengan lahirnya Kebijakan Otonomi. Daerah yang lahir dari Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui dengan disyahnkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan diperbaharui lagi pada tahun 2014 menjadi UU No. 23 tahun 2014 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi UU No. 33 Tahun 2004.

Penyelenggaraan desentralisasi terkait dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya adalah pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya masing-masing dan memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal demi terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

Abdul Halim (2011:253) menjelaskan bahwa ciri utama daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan

keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Fakir keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah.

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman, serta pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan

yang diperlukan daerah (Abdul Halim, 2014:L-5).

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh tiap pemerintahan kabupaten/pemerintahan kota. Semakin besar pendapatan asli daerah dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maka pemerintah kota tersebut tingkat kemandirian keuangannya tinggi. Pendapatan asli daerah itu sendiri merupakan poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas pendapatan asli daerah tersebut dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah yang dianggarkan dengan realisasi pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika nantinya struktur pendapatan asli daerah kuat boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan struktur industri yang mantap beserta obyek praja dan retribusi yang taat.

Selain pendapatan asli daerah, dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Akan tetapi, diharapkan setiap daerah tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri.

Penelitian sejenis terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Bambang Kurniawan (2009) telah meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Rutin Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Studi kasus pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja rutin tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Reza Marizka (2013) telah meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Studi kasus pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2006-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah di Kota Tasikmalaya.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Tasikmalaya.
3. Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Tasikmalaya.
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang menuturkan atau menggambarkan situasi yang terjadi pada masa sekarang, kemudian menganalisis serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh dengan analisa tertentu.

Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini diperlukan data-data yang sesuai dengan topik penelitian. Data yang diteliti adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah periode 2004 sampe 2015 (10 tahun). Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan. Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung pada objek penelitian. Teknik yang dilaksanakan untuk memperoleh data-

data sekunder diperoleh dari buku-buku serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik Analisis Data:

1. Analisis Regresi Berganda
Menggunakan analisis regresi berganda karena data yang digunakan merupakan data absolut dan peneliti hanya ingin mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y, tanpa mengetahui hubungan antar variabel X.
2. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas
 - b. Uji Autokorelasi
 - c. Uji Multikolinearitas
 - d. Uji Heteroskedastisitas
3. Koefisien Korelasi Berganda
4. Koefisien Determinasi (R²)
5. Uji Hipotesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang diperoleh mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2004-2015 dapat diketahui pada tahun 2004 penerimaan pendapatan asli daerah mencapai Rp 31.519.058.438,32. Tahun 2005 sampai 2008 pencapaian presentase pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan yang fluktuatif dengan persentase kenaikan secara berturut-turut sebesar 25,96%, 32,05%, 21,46%, 0,27% dan 22,9%. Tahun 2009 penerimaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yaitu penerimaan dari RSUD Tasikmalaya yang pada tahun sebelumnya digolongkan ke dalam retribusi daerah dialihkan ke dalam golongan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sehingga pada tahun tersebut penerimaan retribusi daerah turun secara

drastis dan lain-lain PAD yang sah meningkat 10 kali lipat. Tahun 2010 peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah mencapai 31,59%. Pada tahun 2011 sampai tahun 2014 secara berturut-turut 6,88%, 34,53%, 16,21%, 40,83%. Selama 12 tahun terakhir, tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan mencapai 320,02%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Tasikmalaya meningkatkan kinerja dan memperluas indikator sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah, diantaranya hasil penjualan aset lainnya dan pendapatan jasa layanan umum BLUD.

Dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota Tasikmalaya selama dua belas periode terakhir cenderung meningkat, hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Tasikmalaya memerlukan banyak dana untuk menjalankan program pemerintahan. Di samping itu, meskipun pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya terus meningkat namun belum bisa memenuhi pembiayaan terhadap belanja daerah. Sehingga dana perimbangan menjadi dana yang diperlukan dalam membiayai belanja daerah. Pada tahun 2004 penerimaan dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat mencapai Rp 241.000.652.378,00 dan meningkat 1,10% pada tahun selanjutnya. Tahun 2006 sejalan dengan kebutuhan program pemerintahan dan meningkatnya belanja daerah, dana perimbangan untuk mengatasi defisit pun meningkat sampai 53,75%. Tahun 2007 sampai tahun 2009 penerimaan dana perimbangan pun meningkat secara berturut-turut sebesar 4,10%, 11,4% dan 10,12%. Penurunan penerimaan dana perimbangan pun dialami oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2010 sebesar 3,67%. Pada tahun 2011 sampai 2014 penerimaan dana perimbangan mengalami peningkatan yang fluktuatif yaitu sebesar 11,17%, 19,02%, 10,2% dan 11,875. Pada tahun 2015 penerimaan Dana Bagi Hasil dari pemerintah dari sektor bukan pajak meningkat sebesar 17 kali lipat dikarenakan

dana bagi hasil dari pertambangan panas bumi dan sumber daya alam perikanan meningkat secara signifikan dan Dana Alokasi Khusus sebesar 4 kali lipat dari tahun sebelumnya sehingga penerimaan dana perimbangan pun meningkat sebesar 21,94%.

Kemandirian keuangan daerah Kota Tasikmalaya menggunakan analisis rasio kemandirian mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2004 tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Tasikmalaya sebesar 10,41% dan mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya menjadi 12,23%. Namun pada tahun 2006 tingkat kemandirian keuangan menurun menjadi 11,09%. Pada tahun 2007 sampai 2014 mengalami kenaikan dan penurunan yaitu 11,32%, 10,35%, 11,04%, 12,47%, 12,05%, 14,05%, 12,64 dan 15,33%. Tahun 2015 belanja daerah Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan yang cukup tinggi sehingga pendapatan asli daerah yang meningkat 4 kali lipat lebih dari tahun sebelumnya pun tidak dapat menutupi seluruh kebutuhan program pemerintahan. Sehingga masih diperlukannya bantuan dari eksternal baik dari Pemerintah Pusat ataupun dari Pemerintah Provinsi yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tingkat kemandirian keuangan daerah meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 31,13%.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Secara Parsial Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS Versi 16.0 untuk analisis linier berganda, besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah diperoleh koefisien partial sebesar 0.982 dan koefisien determinasi sebesar 0.964 atau berarti bahwa 96,4% variabilitas dari variabel Y (kemandirian keuangan daerah) dapat diterangkan (dipengaruhi) oleh

variabel X1 (pendapatan asli daerah). Pendapatan asli daerah memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 96,4%, artinya bahwa semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka akan semakin meningkat tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 96,4% sedangkan sisanya 3,6% dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil analisis koefisien korelasi dari variabel X1 dengan variabel Y yang diteliti diperoleh koefisien partial sebesar 0,982. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat karena berada diantara 0,800 – 1,000.

Dari hasil koefisien regresi pendapatan asli daerah (X1) sebesar (2,145) dalam hal ini berarti setiap meningkatnya (X1) sebesar 1% dan dana perimbangan (X2) tetap, maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 214,5%.

Berdasarkan hipotesis dengan menggunakan uji t pada perhitungan hasil SPSS versi 16.00 yang tersaji pada untuk variabel pendapatan asli daerah diperoleh nilai thitung = 15,816 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan $df = (n-k-1) = 8$ maka nilai $t_{tabel} = 2,306$ dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa nilai $thitung > tabel$ dan berdasarkan probabilitas nilai signifikan sebesar 0,000 sedangkan tingkat kesalahan sebesar 5% ($\alpha 0,05$) sehingga $sig < \alpha$ atau $0,000 < 0,05$ artinya H_0 ditolak H_a diterima atau pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya, begitu pula sebaliknya semakin kecil pendapatan

asli daerah yang diperoleh maka semakin pula tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Reza Marizka (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan positif. Sesuai dengan data yang diperoleh penulis pada realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya, mencerminkan bahwa pada tahun periode yang diteliti oleh penulis, pendapatan asli daerah yang diperoleh selama 12 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejalan dengan itu, kebutuhan dalam program pemerintahan pun semakin meningkat setiap tahunnya sehingga belanja daerah pun meningkat. Hal tersebut tidak dapat ditutupi oleh pendapatan asli daerah sendiri sehingga masih memerlukan bantuan eksternal untuk menutupi kekurangannya dan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Tasikmalaya.

Pengaruh Dana Perimbangan Secara Parsial Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 16.0 untuk variabel X2 (dana perimbangan) terhadap variabel Y (kemandirian keuangan daerah) diperoleh koefisien partial sebesar - 0,228 dan koefisien determinasi sebesar 0,052, berarti bahwa 5,2 % variabilitas dari variabel Y (kemandirian keuangan daerah) dapat diterangkan (dipengaruhi) oleh variabel X2 (kemandirian keuangan daerah). Dana perimbangan memberikan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 5,2%, artinya bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima oleh suatu daerah maka akan semakin menurun tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 5,2%

sedangkan sisanya 94,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil koefisien korelasi dari variabel X2 dengan variabel Y yang diteliti diperoleh dari koefisien partial sebesar - 0,228. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh dana perimbangan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah mempunyai hubungan yang rendah karena berada diantara 0,20 – 0,399.

Berdasarkan hipotesis dengan menggunakan uji t pada perhitungan hasil SPSS versi 16.00 yang tersaji pada lampiran (1) untuk variabel Simpanan Sukarela diperoleh nilai thitung 2,629 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 dan $df = (n-k-1) = 8$ maka nilai ttabel = $\pm 2,306$ dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa nilai thitung < ttabel ($-2,629 < - 2,306$), dan berdasarkan probabilitas nilai signifikan sebesar 0,002 sedangkan tingkat kesalahan sebesar 5% ($\alpha 0,05$) sehingga $sig < \alpha$ atau $0,002 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dari hasil pengolahan data spss diatas, dapat diartikan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian Bambang Kurniawan (2009) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Adanya pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program pemerintahan apabila mengalami defisit. Tingkat kemandirian keuangan daerah akan terus mengalami peningkatan apabila pendapatan asli daerah lebih besar dari dana perimbangan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Secara Simultan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penghitungan SPSS 16.0 diperoleh koefisien determinasi angka R² (R Square) sebesar 0,986 atau 98,6%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 98,6%. atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 98,6% variasi variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 1,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 98,6% sedangkan 1,4% dipengaruhi oleh faktor lain seperti transfer dari provinsi dan pinjaman.

Hasil koefisien korelasi dari variabel independen dengan variabel dependen yang diteliti diperoleh nilai r sebesar 0,993. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat karena berada diantara 0,80 – 1,000.

Dari hasil koefisien regresi konstanta sebesar 0,105 menyatakan bahwa pada saat variabel bebasnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan bernilai 0 maka kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 0,105.

Dari hasil perhitungan uji simultan yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hal ini ditunjukkan dengan diperoleh perhitungan uji simultan pada tabel anova nilai F sebesar 309,118, sedangkan tingkat kesalahan

sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) diperoleh Ftabel dengan batasan F(n-k-1) sebesar 4,46. Ternyata harga Fhitung lebih besar dari Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil perhitungan uji simultan pada tabel anova diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 sedangkan tingkat kesalahan sebesar 5% ($\alpha 0,05$) sehingga $\text{sig} > \alpha$ atau $0,00 > 0,05$ artinya Ho ditolak dan Ha diterima atau pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kemandirian daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2004 sampai 2015, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 - a. Pendapatan asli daerah berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah selama periode 2004 sampai 2015 terus meningkat. Hal ini dikarenakan pemerintah terus memperluas sumber penerimaan asli daerah dan meningkatkan efektivitas pemungutan sumber pendapatan asli daerah. Terutama pajak daerah terus

- memperluas jenis pajak diantaranya Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov), PBB Pedesaan & Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Dana perimbangan yang diterima berasal dari dana bagi hasil pajak dan bukan dari pusat, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pada selama 12 tahun tersebut penerimaan dana perimbangan selalu meningkat. Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk menjalankan program pemerintah yaitu belanja daerah setiap tahunnya terus meningkat. Sehingga pemerintah memerlukan dana perimbangan untuk menutupi defisit anggaran.
 - c. Kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan dan peningkatan. Selama 11 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2004 – 2014 Kota Tasikmalaya masuk dalam kategori kurang karena berada di antara 10,01 – 20,00. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan ke dalam kategori sedang karena berada di antara 30,01 – 40,00. Kemandirian keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam membiayai belanja daerahnya yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah.
2. Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan asli daerah maka meningkat pula tingkat kemandirian keuangan daerah, dan sebaliknya.
 3. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan yang diterima lebih kecil dari pendapatan asli daerah akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dan sebaliknya.
 4. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun ada beberapa faktor lain yang tidak diteliti penulis yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah

REFERENSI

- Abdul, Halim. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2011). *Pengendalian Keuangan Daerah. Edisi 3*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____ dan Damayanti T.W. (2007). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- _____. (2002). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Afrizal, Tahar dan Maulida Zakhia. (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Agus, Melas C. (2015). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

- Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah*. Jurnal. Palu: Universitas Tadulako.
- Bambang, Kurniawan. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Rutin Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Jurnal. Jember: Universitas Jember.
- Deddy, S. Bratakusumah (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Damang. (2011). *Pendapatan Asli Daerah*. <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>. 24 Maret 2016.
- Juli, Panglima Saragih. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Bandung: Ghali Indonesia.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi Graha Persada.
- Mohammad, Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Kota Tasikmalaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. (2013). *Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya*. Tasikmalaya: Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya.
- Pemerintah Kota Tasikmalaya Dinas Pendapatan Daerah. (2011). *Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya*. Tasikmalaya: Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
- Renny, Nur'ainy, dkk. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Jurnal. Jakarta: Universitas Gunadarma Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Perubahan atas Republik Indonesia*. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. 2009. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*.
- _____. (2004). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Perubahan atas Republik Indonesia*. 1999. *Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Reza, Marizka. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Jurnal. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Swastika, Prasasti. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.